

## BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### 4.1 Sejarah Kabupaten Muara Enim

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, dan merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 9.140,50 Km<sup>2</sup>, dan terbagi menjadi 22 Kecamatan yang terdiri dari 305 desa dan 16 kelurahan.<sup>70</sup> Pada masa pendudukan Hindia Belanda, saat struktur pemerintahan di daerah masih berbentuk Marga, di sepanjang aliran tiga sungai itu terdapat beberapa pemerintahan marga. Di jalur Sungai Enim misalnya meliputi Marga Tamblang Ujan Mas sampai Marga Sungai Rotan. Sedangkan di sepanjang Sungai Lematang meliputi Marga Semendo sampai Marga Tamblang Patang Puluh Bubung. Semuanya bergabung dalam Wilayah Administratif *Onder Afdeling* Lematang Ilir. Kabupaten Muaraenim berada dan tunduk pada *Afdeling Palembang Sche Boven Landen* dengan dipimpin seorang Asisten Residen berkedudukan di Lahat.

Asisten Residen selain membawahi wilayah Lematang Ilir juga membawahi *Onder Afdeling* Lematang Ulu dengan Ibukota Lahat, *Onder Afdeling* Tebing Tinggi dengan Ibukota Tebing Tinggi dan *Onder Afdeling* Pasemah dengan Ibukota Pagaralam. Pada masa pendudukan Jepang wilayah administrative *Onder Afdeling* berganti nama menjadi Kewedanaan dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Saat itu wilayah-wilayah marga dibagi dalam dua wilayah Kewedanaan; Kewedanaan Lematang Ogan Tengah, dan Kewedanaan Lematang Ilir. Kewedanaan Lematang Ogan Tengah dengan wilayah meliputi Marga Rambang Niru, Marga Empat Petulai Curup, Marga Empat Petulai Dangku, Marga Sungai Rotan (yang sebelumnya marga-marga ini masuk wilayah Lematang Ilir), Marga Rambang Kapak Tengah, Marga Lubai Suku Satu, Marga Lubai Suku Dua (sebelumnya masuk wilayah Ogan Ulu), Marga Alai, Marga Lembak, Marga Kartamulya, Marga Gelumbang, Marga Tambangan Kelekar (sebelumnya masuk wilayah Ogan Ilir) serta Marga Abab dan Marga Penukal yang sebelumnya masuk wilayah sekayu. Sementara itu Kewedanaan Lematang

---

<sup>70</sup> BPS Kabupaten Muara Enim, Muara Enim Dalam Angka 2008, .3

Iilir meliputi Marga Semendo Darat, Marga Panang Sangang Puluh, Marga Panang Selawi, Marga Panang Ulung Puluh, Marga Lawang Kidul, Marga Tamblang Karang Raja, Marga Tamblang Patang Puluh Bubung dan Marga Tamblang Ujan Mas. Setiap marga di bawah kepala pemerintahan bernama Pasirah. Pada masa kemerdekaan, berdasarkan sidang Dewan Keresidenan Palembang Tanggal 20 Nopember 1946, Wilayah Kewedanaan Lematang Iilir dan Lematang Ogan Tengah digabung menjadi Kabupaten Lematang Iilir Ogan Tengah disingkat LIOT dengan Ibukota Muara Enim.

Berdasarkan SK Bupati Kdh Tk II LIOT Nomor 47/Deshuk/1972 Tanggal 14 Juni 1972 ditetapkan Tanggal 20 Nopember 1946 sebagai Hari Jadi Kabupaten Muara Enim Lalu berdasarkan SK Bupati Tingkat II Muara Enim Nomor 2642/B/1980 Tanggal 6 Maret 1980, terhitung Tanggal 1 April 1980 nama Kabupaten LIOT dikembalikan pada nama semula yaitu Kabupaten Tingkat II Muara Enim, hal mana telah tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia—LN RI, Tahun 1956), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (LN RI Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang darurat Nomor 6 Tahun 1956 (LN RI Tahun 1956 Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan juncto UU Nomor 28 tahun 1959 (LN RI Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan LNRI Nomor 1821) Tentang Penetapan UU Darurat di atas sebagai Undang-Undang (UU).

Berdasarkan UU Nomor Nomor 28 Tahun 1959 tersebut pula Muara Enim ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dengan nama Kabupaten daerah Tingkat II Muaraenim dengan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan Tanggal 20 Maret 1950 Nomor Gb/100/1950. Lalu berdasarkan Pasal 121 UU Nomor 22 tahun 1999 (LN RI Tahun 1999 Nomor 60 Tentang Pemerintahan Daerah, sebutan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim berubah menjadi Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Muara Enim memiliki 22 kecamatan yaitu : Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Rambang, Kecamatan Lubai, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim,

Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Benakat, Kecamatan Rambang dangku, Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Lembak, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Penukal, Kecamatan Abab, Kecamatan Muara Belida dan Kecamatan Kelekar.

Jarak terjauh dari ibukota Kabupaten Muara Enim ke ibukota kecamatan adalah Kecamatan Muara Belida yaitu sejauh 156 km, Kecamatan Kelekar sejauh 126 km, Kecamatan Rambang sejauh 122 km, dan Kecamatan Gelumbang sejauh 121 km. Sementara yang terdekat adalah Kecamatan Ujan Mas dengan jarak hanya 17 km.<sup>71</sup>

#### **4.2 Kecamatan Lawang Kidul**

Kecamatan Lawang Kidul merupakan salah satu wilayah administrasi di dalam Kabupaten Muara Enim yang berdiri pada tanggal 4 Juli 1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1996 tentang Pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim, dan Musi Rawas dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, yang sebelumnya wilayah Kecamatan Lawang Kidul masih berada di wilayah administrasi Kecamatan Tanjung Agung. Kecamatan Lawang Kidul memiliki luas wilayah 380,84 km<sup>2</sup> serta jumlah penduduk sebesar 59.988 jiwa dengan perincian 30.151 laki-laki, dan 29.837 perempuan<sup>72</sup>. Dengan jumlah penduduk tersebut, Kecamatan Lawang Kidul merupakan dengan jumlah penduduk tertinggi di antara kecamatan-kecamatan lain di dalam wilayah administrasi Kabupaten Muara Enim. Ibukota Kecamatan Lawang Kidul berjarak 20 km dari ibukota Kabupaten Muara Enim. Di Kecamatan Lawang Kidul sebagian penduduk bekerja di sektor pertambangan batubara, selain terdapat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan., dan terdapat sebagian lagi di sektor perdagangan dan jasa.

Kecamatan Lawang Kidul terbagi menjadi 3 kelurahan dan 4 desa yakni Kelurahan Tanjung Enim, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, dan Kelurahan Pasar Tanjung Enim serta Desa Lingga, Desa Tegal Rejo, Desa Keban Agung, dan Desa

---

<sup>71</sup> BPS, *Op.Cit* 77-78

<sup>72</sup> *Ibid.*,78

Darmo. Sektor pertambangan batubara merupakan sektor unggulan yang dihasilkan di wilayah kecamatan ini, dengan PT Batubara Bukit Asam sebagai BUMN yang melakukan pengelolaan tambang, sektor yang juga menjadi penerimaan terbesar bagi daerah dalam struktur APBD Kabupaten Muara Enim. Selain itu sektor pertambangan batubara juga mendominasi struktur ekonomi kabupaten dengan persentase sebesar 61,26 % PDRB berasal dari sektor ini. Kecamatan Lawang Kidul terbagi menjadi 3 Kelurahan dan desa dan tiap-tiap kelurahan desa terbagi menjadi RW dan RT dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Jumlah Rw dan Dusun per Kelurahan dan Desa**

No	Kelurahan / Desa	Jumlah Rw	Jumlah Dusun
1	Kelurahan Tanjung Enim	12	-
2	Kelurahan Pasar Tanjung Enim	7	-
3	Kelurahan Tanjung Enim Selatan	5	-
4	Desa Lingga	-	5
5	Desa Tegal Rejo	-	4
6	Desa Keban Agung	-	4
7	Desa Darmo	-	4

Sumber : Data Demografi Kecamatan Lawang Kidul.

#### 4.2.1 Kondisi Sosial Masyarakat Kecamatan Lawang Kidul

Jumlah Penduduk Kecamatan Lawang Kidul pada bulan Januari 2010 sebanyak 58.487 jiwa, jumlah penduduk per kelurahan dan desa diuraikan melalui tabel berikut<sup>73</sup> :

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk per Kelurahan dan Desa**

No	Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P
1	KEL. TANJUNG ENIM	5.465	5.479	10.944
2	KEL.PASAR TANJUNG ENIM	4.975	5.427	10.402

<sup>73</sup> Laporan Kependudukan Kecamatan Lawang Kidul Januari 2010

Tabel 4.2 (Sambungan)

No	Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P
3	KEL. TANJUNG ENIM SELATAN	3.826	3.822	7.648
4	DESA TEGAL REJO	6.028	6.076	12.104
5	DESA LINGGA	4.107	4.137	8.244
6	DESA KEBAN AGUNG	3.439	3.446	6.885
7	DESA DARMO	1.154	1.106	2.260
<b>Jumlah</b>		<b>28.994</b>	<b>29.943</b>	<b>58.487</b>

Sumber : Laporan Kependudukan Kecamatan Lawang Kidul Januari 2010

Jumlah penduduk di Kecamatan Lawang Kidul berdasarkan kelompok umur pada bulan Januari 2010 dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel 4.3 Data Penduduk Kecamatan Lawang Kidul Berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	00-04	2631	2640	5271
2	05-09	2458	2748	5206
3	10-14	2675	2823	5498
4	15-19	2721	2738	5459
5	20-24	3020	2951	5971
6	25-29	2694	2859	5553
7	30-34	2697	3060	5757
8	35-39	2657	2825	5482
9	40-44	2210	2118	4328
10	45-49	1770	1425	3195
11	50-54	1349	1090	2439
12	55-59	732	665	1397
13	60-69	576	641	1217
14	70-74	425	484	909
15	> 74	379	426	805
<b>Jumlah</b>		<b>28.994</b>	<b>29.493</b>	<b>58.487</b>

Sumber : Laporan Kependudukan Kecamatan Lawang Kidul Januari 2010

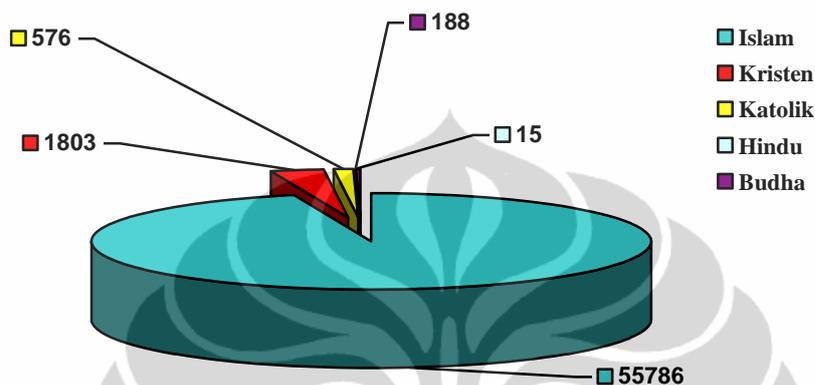
Sedangkan data penduduk menurut tingkat pendidikan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.4 Data Penduduk Kecamatan Lawang Kidul Menurut Tingkat Pendidikan

No	Desa/Kelurahan	TIDAK SEKOLAH	SD- SEDERAJAT	SLTP- SEDERAJAT	SLTA- SEDERAJAT	AKADEMI/ DIPLOMA	SARJANA	PASCA SARJANA	JUMLAH
1	KEL. TG ENIM	1.181	2.196	885	733	3.425	332	17	8.769
2	KEL. PASAR TG. ENIM	1.191	1.638	896	707	2.775	293	12	7.512
3	KEL. TG ENIM SELATAN	740	1.426	483	366	2.373	284	15	5.687
4	DS. TEGAL REJO	610	1.880	794	447	2.441	281	16	6.469
5	DS. LINGGA	931	1.513	556	424	1.787	166	9	5.386
6	DS. KEBAN AGUNG	804	1.459	652	406	1.745	208	6	5.280
7	DS. DARMO	326	484	109	65	406	104	0	1.494
<b>JUMLAH</b>		<b>5.783</b>	<b>10.596</b>	<b>4.375</b>	<b>3148</b>	<b>14.952</b>	<b>1.668</b>	<b>75</b>	<b>40.597</b>

Sumber : Laporan Kependudukan Kecamatan Lawang Kidul Januari 2010

Dilihat dari komposisi penduduk menurut pemeluk agama di Kecamatan Lawang Kidul antara lain Islam sebanyak 55.786 orang, Kristen Protestan 1.803 orang, Kristen Katolik sebanyak 576 orang, Hindu 15 orang serta Budha sebanyak 188 orang. Komposisi penduduk menurut agama di Kecamatan Lawang Kidul tersebut digambarkan melalui bagan berikut :



**Gambar 4.1 Komposisi penduduk menurut agama di Kecamatan Lawang Kidul**

Sumber : Laporan Kependudukan Kecamatan Lawang Kidul Januari 2010

Tabel 4.5 berikut menguraikan data penduduk per desa dan kelurahan di Kecamatan Lawang Kidul menurut penghasilan / pendapatan keluarga perbulannya :

**Tabel 4.5 Data Penduduk Menurut Penghasilan per Bulan**

No	Desa/Kelurahan					
		< 600.000	600.000 s.d 1.000.000	1.000.000 s.d 1.400.000	1.400.000 s.d 1.800.000	>1.800.000
1	KEL. TG ENIM	410	1.213	1.646	291	159
2	KEL.PASAR TG. ENIM	460	1.183	1.853	468	110
3	KEL.TG ENIM SELATAN	351	683	1.036	970	1.484
4	DS. TEGAL REJO	299	1.396	1.637	287	124
5	DS. LINGGA	480	906	1.105	197	126
6	DS. KEBAN AGUNG	361	424	853	190	129
7	DS. DARMO	203	127	195	77	0
<b>JUMLAH</b>		<b>2.564</b>	<b>5.392</b>	<b>8.235</b>	<b>2.480</b>	<b>2132</b>

Sumber : Laporan Kependudukan Kecamatan Lawang Kidul Januari 2010

### 4.3 Program BLT di Kecamatan Lawang Kidul

Program Bantuan Langsung Tunai tahun 2009, yang merupakan pembagian bantuan tahap ketiga, dengan jumlah penerima di Kecamatan Lawang Kidul sebanyak 2545 rumah tangga sasaran, dengan rincian per kelurahan dan desa sebagai berikut :

**Tabel 4.6 Jumlah Penerima BL di Kecamatan Lawang Kidul**

No	Desa / Kelurahan	Jumlah Penerima
1	KEL. TANJUNG ENIM	421
2	KEL.PASAR TANJUNG. ENIM	594
3	KEL.TANJUNG ENIM SELATAN	189
4	DESA TEGAL REJO	529
5	DESA LINGGA	296
6	DESA KEBAN AGUNG	404
7	DESA DARMO	112
JUMLAH		2.545

Sumber : Daftar Pengawasan Pembayaran BLT 2009 KP Muara Enim

Pembagian BLT di Kecamatan Lawang Kidul tahun 2009 mulai dibayarkan tanggal 15 April 2009 sampai dengan 30 April 2009, bertempat di kantor pos Tanjung Enim. Adapun persyaratan untuk dapat melakukan pengambilan dana antara lain penerima harus membawa Kartu Kompensasi BBM (KKB) tahun 2008, kartu identitas (KTP/SIM) yang masih berlaku atau surat keterangan dari aparat pemerintah setempat, serta dengan membawa potongan carik daftar BLT tahun 2009 yang telah ditandatangani oleh masing-masing Rumah Tangga Sasaran. Besaran uang bantuan yang diberikan senilai Rp.200.000,- . Pembagian BLT tahun 2009 merupakan kelanjutan dari tahapan pembagian BLT pada tahun 2008.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Analisis Data**

##### **5.1.1 Profil Responden**

Berdasarkan kuesioner yang telah dihimpun dari responden diketahui bahwa berdasarkan jenis kelamin, dari 374 responden, jumlah responden pria sebanyak 274 orang (79 %), dan sisanya responden wanita sebanyak 73 orang (21%). Berdasarkan usia responden, sebagian besar penerima bantuan langsung tunai yang menjadi responden dalam penelitian ini berusia 50 tahun keatas sebanyak 167 orang (48,1%), kemudian berasal dari kelompok usia 36-50 tahun sebanyak 107 orang (30,8%), disusul kelompok usia 26-35 tahun sebanyak 70 orang (20,2%), dan selanjutnya terakhir kelompok usia 17-25 tahun sebanyak 3 orang (0,9%).

Ditinjau dari tingkat pendidikan, sebanyak 122 orang (35,2%) berpendidikan terakhir setingkat sekolah dasar (SD), kemudian disusul berpendidikan terakhir setingkat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) sebanyak 106 orang (30,5%), kemudian 82 orang responden (23,6%) tidak sekolah, jumlah terkecil pendidikan responden adalah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) sebanyak 37 orang (10,7%). Berdasarkan jenis pekerjaan sebagian besar responden sebanyak 176 orang (50,7%) berprofesi sebagai buruh, 91 orang (26,2%) tidak bekerja, disusul dengan profesi sebagai tani sebanyak 42 orang (12,1%), dan disusul dengan pedagang sebanyak 23 orang (23%), dan lain-lain sebanyak 15 orang (4,3%). Sementara itu berdasarkan tingkat penghasilan, sebanyak 141 orang (40,6%) dengan kelompok penghasilan Rp.100.000,- s/d Rp.500.000,-, selanjutnya kelompok dengan tingkat penghasilan sebesar Rp.500.001,- s/d Rp.1.000.000,- sebanyak 112 orang (32,3%), disusul dengan responden yang tidak memiliki penghasilan sebanyak 91 orang (26,2%), dan terakhir kelompok responden dengan berpenghasilan lebih dari Rp.1.000.000,- sebanyak 3 orang (0,9%).

Berdasarkan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, sebanyak 138 orang (39,8%) dengan jumlah tanggungan sebanyak 3-4 orang,

kemudian disusul dengan jumlah tanggungan sebanyak 1-2 orang sejumlah 116 orang (33.4%), selanjutnya diikuti dengan jumlah tanggungan sebanyak 5-6 orang sebanyak 48 orang (13.8%), tidak memiliki tanggungan sebanyak 35 orang (10.1%), jumlah terkecil adalah dengan jumlah tanggungan lebih dari 7 orang sebanyak 10 orang (2.9%). Terakhir berdasarkan jumlah pengeluaran perbulannya, responden dengan pengeluaran Rp.700.000,- s/d Rp.1.000.000,- sebanyak 143 orang (41.2%), kemudian disusul sebanyak 120 orang dengan pengeluaran lebih dari Rp.1.000.000,-, selanjutnya dengan pengeluaran Rp.500.001,- s/d Rp.700.000,- sebanyak 82 orang (23.6%), dan jumlah terkecil responden dengan tingkat pengeluaran di bawah Rp.500.000,- sebanyak 2 orang (0.6%). Profil responden tersebut dirangkum melalui tabel berikut :

**Tabel 5.1 Profil Responden**

No	KARAKTERISITIK DEMOGRAFIS	JUMLAH	PERSENTASE
1	<b>Jenis Kelamin :</b>		
	a. Pria	274	79.0
	b. Wanita	73	21.0
2	<b>Usia :</b>		
	a. 50 Tahun ke Atas	167	48.1
	b. 36-50 Tahun	107	30.8
	c. 26-35 Tahun	70	20.2
	d. 17-25 Tahun	3	0.9
3	<b>Tingkat Pendidikan :</b>		
	a. SD	122	35.2
	b. SLTP	106	30.5
	c. Tidak Sekolah	82	23.6
	d. SLTA	37	10.7
4	<b>Pekerjaan :</b>		
	a. Buruh	176	50.7
	b. Tidak Bekerja	91	26.2
	c. Tani	42	12.1
	d. Pedagang	23	6.6
	e. Lain-lain	15	4.3

Tabel 5.1 (Sambungan)

No	KARAKTERISITIK DEMOGRAFIS	JUMLAH	PERSENTASE
5	<b>Tingkat Penghasilan</b>		
	a.Rp.100.000,- s/d Rp.500.000,-	141	40.6
	b.Rp.500.001,- s/d Rp.1.000.000,-	112	32.3
	c.Tidak Ada penghasilan	91	26.2
	d.Lebih dari Rp.1.000.000,-	3	0.9
6	<b>Jumlah Tanggungan</b>		
	a.3-4 Orang	138	39.8
	b.1-2 Orang	116	33.4
	c.5-6 Orang	48	13.8
	d.Tidak ada tanggungan	35	10.1
	e.Lebih dari 7 orang	10	2.9
7	<b>Pengeluaran per Bulan</b>		
	a.Rp.700.001,- s/d Rp.1.000.000,-	143	41.2
	b.Lebih Dari Rp.1.000.000,-	120	34.6
	c.Rp.500.001,- s/d Rp.700.000,-	82	23.6
	d.Di Bawah Rp.500.000,-	2	0.6

Sumber : Hasil Penelitian Penulis

### 5.1.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan sebelum menganalisis instrumen dari variabel tentang kinerja kebijakan bantuan langsung tunai, uji validitas dan reliabilitas ditujukan untuk mengetahui seberapa valid item instrumen penelitian dalam mencerminkan variabel penelitian. Uji validitas dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus teknik korelasi *product moment* dari Karl Pearson, dengan taraf signifikansi 5%, dengan angka kritik nilai  $r = 0.632$ . Sementara uji reliabilitas dilakukan untuk menguji apakah instrumen reliabel, dengan melihat konsistensi dan kecermatan instrumen tersebut. Rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini adalah koefisien *cronbach*

*alpha* dari Cronbach. Berikut ditampilkan tabel hasil uji validitas dan reliabilitas dari instrumen yang digunakan dalam penelitian ini :

**Tabel 5.2 Hasil Uji Validitas**

<b>Variabel : Efektifitas</b>			
<b>Indikator</b>	<b>r Hasil</b>	<b>Angka Kritik Nilai r</b>	<b>Tafsir</b>
1. Saya dapat memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga dengan adanya program BLT.	0,970	0,632	Valid
2. Dengan adanya program BLT saya dapat lebih sejahtera walaupun terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok.	0,843	0,632	Valid
3. Program BLT merupakan bentuk tanggung jawab sosial pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga bahan bakar minyak.	0,847	0,632	Valid
<b>Variabel : Perataan</b>			
<b>Indikator</b>	<b>r Hasil</b>	<b>Angka Kritik Nilai r</b>	<b>Tafsir</b>
1. Identitas yang tertera di Kartu Kompensasi BBM (KKB) sudah sesuai dengan identitas saya sebenarnya.	0,856	0,632	Valid
2. Ukuran yang digunakan pemerintah untuk menentukan kriteria dana BLT sudah tepat.	0,855	0,632	Valid
3. Penerima dana BLT yang ada di lingkungan saya sudah memenuhi kriteria atau layak untuk mendapatkan bantuan dana.	0,719	0,632	Valid
4. Dana BLT sudah dibagikan secara merata kepada masyarakat yang memang layak mendapatkan bantuan.	0,813	0,632	Valid
5. Pembagian dana per tiga bulan sudah tepat.	0,751	0,632	Valid
6. Kartu Kompensasi BBM (KKB) sudah dibagikan tepat waktu dan merata.	0,801	0,632	Valid

Tabel 5.2 (sambungan)

<b>Variabel : Responsivitas</b>			
<b>Indikator</b>	<b>r Hasil</b>	<b>Angka Kritik Nilai r</b>	<b>Tafsir</b>
1. Proses sosialisasi program sudah dilaksanakan dengan baik.	0,953	0,632	Valid
2. Pelaporan keluhan sudah berjalan dan diterima dengan baik.	0,888	0,632	Valid
3. Keluhan yang disampaikan sudah ditanggapi dan ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.	0,849	0,632	Valid
4. Saya memiliki ketergantungan terhadap dana dari program BLT ini.	0,791	0,632	Valid
5. Program ini menimbulkan kerawanan dan kecemburuan sosial di masyarakat.	0,884	0,632	Valid
6. Jarak menuju Kantor Pos tempat pengambilan dana BLT tidak jauh.	0,853	0,632	Valid
7. Waktu untuk mengantri pada saat pengambilan dana BLT tidak lama (kurang dari 1 jam).	0,758	0,632	Valid
<b>Variabel : Ketepatan</b>			
<b>Indikator</b>	<b>r Hasil</b>	<b>Angka Kritik Nilai r</b>	<b>Tafsir</b>
1. Dana BLT saya manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok.	0,755	0,632	Valid
2. Dana BLT meningkatkan produktifitas usaha saya dalam mendapatkan penghasilan.	0,808	0,632	Valid
3. Saya setuju jika program ini dialihkan ke program padat karya yang memberdayakan masyarakat.	0,890	0,632	Valid

Sumber : Hasil Penelitian Penulis

Tabel 5.3 Hasil Uji Reliabilitas

<b>Variabel</b>	<b>Cronbach's Alpha</b>	<b>Angka Kritik Nilai r</b>	<b>Tafsir</b>
Efektifitas	0,940	0,632	Reliabel
Perataan	0,926	0,632	Reliabel
Responsivitas	0,955	0,632	Reliabel
Ketepatan	0,905	0,632	Reliabel

Sumber : Hasil Penelitian Penulis

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa valditas untuk setiap instrumen penelitian adalah valid, hal ini terlihat dari nilai r hasil lebih besar dari nilai angka kritik nilai r. Angka kritik nilai r diperoleh dari didapat dari baris tabel pada  $N$  (jumlah responden) – 2. Sehingga didapat untuk taraf signifikansi 5% pada baris  $n-2 = 10-2 = 8$ , angka kritik r adalah 0,632. Nilai r hasil yang didapat untuk tiap-tiap instrumen pertanyaan lebih besar dari 0,632. Untuk uji reliabilitas, terlihat bahwa hasil pengukuran untuk setiap variabel adalah reliabel, ditunjukkan dengan hasil nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari 0,632. berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel kinerja kebijakan valid dan reliabel.

### **5.1.3 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian**

Kuesioner disebarakan kepada reponden sebanyak 347 orang yang merupakan penerima Bantuan Langsung Tunai. Kuesioner tersebut kemudian dikumpulkan untuk kemudian diolah untuk mendapatkan perhitungan statistik deskriptif seperti mean, modus, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum. Perhitungan statistik deskriptif dilakukan pada tiap-tiap variabel, pada variabel efektifitas yang terdiri dari 3 indikator, variabel perataan meliputi 6 indikator, varaibel responsivitas meliputi 7 indikator, dan terkahir variabel ketepatan terdiri atas 3 indikator. Hasil perhitungan statistik deskriptif tiap-tiap variabel ditampilkan melalui tabel berikut :

Tabel 5.4 Analisis Statistik Deskriptif

<b>Variabel : Efektifitas</b>				
<b>Indikator</b>	<b>Mode</b>	<b>Std Deviasi</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>
1. Saya dapat memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga dengan adanya program BLT.	3	0.64	1	4
2. Dengan adanya program BLT saya dapat lebih sejahtera walaupun terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok.	3	0.75	1	4
3. Program BLT merupakan bentuk tanggung jawab sosial pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga bahan bakar minyak.	3	0.63	1	4
<b>Variabel : Perataan</b>				
<b>Indikator</b>	<b>Mode</b>	<b>Std Deviasi</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>
1. Identitas yang tertera di Kartu Kompensasi BBM (KKB) sudah sesuai dengan identitas saya sebenarnya.	3	0.78	1	4
2. Ukuran yang digunakan pemerintah untuk menentukan kriteria dana BLT sudah tepat.	3	0.68	1	4
3. Penerima dana BLT yang ada di lingkungan saya sudah memenuhi kriteria atau layak untuk mendapatkan bantuan dana.	3	0.77	1	4
4. Dana BLT sudah dibagikan secara merata kepada masyarakat yang memang layak mendapatkan bantuan.	3	0.64	1	4
5. Pembagian dana per tiga bulan sudah tepat.	2	0.82	1	4
6. Kartu Kompensasi BBM (KKB) sudah dibagikan tepat waktu dan merata.	3	0.58	1	4

Tabel 5.4 (sambungan)

<b>Variabel : Responsivitas</b>				
<b>Indikator</b>	<b>Mode</b>	<b>Std Deviasi</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>
1. Proses sosialisasi program sudah dilaksanakan dengan baik.	2	0.80	1	4
2. Pelaporan keluhan sudah berjalan dan diterima dengan baik.	3	0.71	1	4
3. Keluhan yang disampaikan sudah ditanggapi dan ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.	3	0.75	1	4
4. Saya memiliki ketergantungan terhadap dana dari program BLT ini.	3	0.63	1	4
5. Program ini menimbulkan kerawanan dan kecemburuan sosial di masyarakat.	2	0.78	1	4
6. Jarak menuju Kantor Pos tempat pengambilan dana BLT tidak jauh.	3	0.83	1	4
7. Waktu untuk mengantri pada saat pengambilan dana BLT tidak lama (kurang dari 1 jam).	2	0.78	1	4
<b>Variabel : Ketepatan</b>				
<b>Indikator</b>	<b>Mode</b>	<b>Std Deviasi</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>
1. Dana BLT saya manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok.	3	0.55	1	4
2. Dana BLT meningkatkan produktifitas usaha saya dalam mendapatkan penghasilan.	2	0.86	1	4
3. Saya setuju jika program ini dialihkan ke program padat karya yang memberdayakan masyarakat.	2	0.85	1	4

Sumber : Hasil Penelitian Penulis

Untuk distribusi frekuensi dari tiap-tiap instrumen variabel dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi

<b>Variabel : Efektifitas</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Jawaban</b>				<b>Total Responden</b>
	<b>Sangat Tidak Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Setuju</b>	<b>Sangat Setuju</b>	
1. Saya dapat memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga dengan adanya program BLT.	5 (1,4%)	38 (11%)	217 (62,5%)	87 (25,1%)	347 (100%)
2. Dengan adanya program BLT saya dapat lebih sejahtera walaupun terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok.	14 (4%)	37 (10,7%)	186 (53,6%)	110 (31,7%)	347 (100%)
3. Program BLT merupakan bentuk tanggung jawab sosial pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga bahan bakar minyak.	8 (2,3%)	31 (8,9%)	233 (67,1%)	75 (21,6%)	347 (100%)
<b>Variabel : Perataan</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Jawaban</b>				<b>Total Responden</b>
	<b>Sangat Tidak Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Setuju</b>	<b>Sangat Setuju</b>	
1. Identitas yang tertera di Kartu Kompensasi BBM (KKB) sudah sesuai dengan identitas saya sebenarnya.	23 (6,6%)	62 (17,9%)	198 (57,1%)	64 (18,4%)	347 (100%)
2. Ukuran yang digunakan pemerintah untuk menentukan kriteria dana BLT sudah tepat.	12 (3,5%)	40 (11,5%)	224 (64,6%)	71 (20,5%)	347 (100%)
3. Penerima dana BLT yang ada di lingkungan saya sudah memenuhi kriteria atau layak untuk mendapatkan bantuan dana.	14 (4%)	86 (24,8%)	177 (51%)	70 (20,2%)	347 (100%)
4. Dana BLT sudah dibagikan secara merata kepada masyarakat yang memang layak mendapatkan bantuan.	8 (2,3%)	32 (9,2%)	225 (64,8%)	82 (23,6%)	347 (100%)
5. Pembagian dana per tiga bulan sudah tepat.	49 (14,1%)	148 (42,7%)	124 (35,7%)	26 (7,5%)	347 (100%)
6. Kartu Kompensasi BBM (KKB) sudah dibagikan tepat waktu dan merata.	5 (1,4%)	16 (4,6%)	234 (67,4%)	92 (26,5%)	347 (100%)

Tabel 5.5 (sambungan)

<b>Variabel : Responsivitas</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Jawaban</b>				<b>Total Responden</b>
	<b>Sangat Tidak Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Setuju</b>	<b>Sangat Setuju</b>	
1. Proses sosialisasi program sudah dilaksanakan dengan baik.	22 (6,3%)	142 (40,9%)	135 (38,9%)	48 (13,8%)	347 (100%)
2. Pelaporan keluhan sudah berjalan dan diterima dengan baik.	28 (8,1%)	128 (36,9%)	176 (50,7%)	15 (4,3%)	347 (100%)
3. Keluhan yang disampaikan sudah ditanggapi dan ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.	24 (6,9%)	140 (40,3%)	152 (43,8%)	31 (8,9%)	347 (100%)
4. Saya memiliki ketergantungan terhadap dana dari program BLT ini.	6 (1,7%)	28 (8,1%)	218 (62,8%)	95 (27,4%)	347 (100%)
5. Program ini menimbulkan kerawanan dan kecemburuan sosial di masyarakat.	52 (15%)	198 (57,1%)	71 (20,5%)	26 (7,5%)	347 (100%)
6. Jarak menuju Kantor Pos tempat pengambilan dana BLT tidak jauh.	35 (10,1%)	108 (31,1%)	159 (45,8%)	45 (13%)	347 (100%)
7. Waktu untuk mengantri pada saat pengambilan dana BLT tidak lama (kurang dari 1 jam).	29 (8,4%)	147 (42,4%)	138 (39,8%)	33 (9,5%)	347 (100%)
<b>Variabel : Ketepatan</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Jawaban</b>				<b>Total Responden</b>
	<b>Sangat Tidak Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Setuju</b>	<b>Sangat Setuju</b>	
1. Dana BLT saya manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok.	2 (0,6%)	10 (2,9%)	217 (62,5%)	118 (34%)	347 (100%)
2. Dana BLT meningkatkan produktifitas usaha saya dalam mendapatkan penghasilan.	94 (27,1%)	173 (49,9%)	52 (15%)	28 (8,1%)	347 (100%)
3. Saya setuju jika program ini dialihkan ke program padat karya yang memberdayakan masyarakat.	90 (25,9%)	174 (50,1%)	56 (16,1%)	27 (7,8%)	347 (100%)

Sumber : Hasil Penelitian Penulis

Di bawah ini akan ditampilkan analisis *multiple response* sebagai hasil dari pilihan jawaban dari sampel terhadap pilihan ganda dari kuesioner yang disebarakan, untuk mengetahui jumlah serta persentase yang dipilih oleh seluruh sampel berkaitan dengan program BLT antara lain sarana transportasi yang digunakan dalam melakukan pengambilan dana, keluhan terhadap program, sumber atau sarana yang digunakan dalam mendapatkan informasi tentang BLT, serta penggunaan dana BLT oleh penerima bantuan :

**Tabel 5.6 Analisis Multiple Response**

<b>Transportasi Yang Digunakan Untuk Pengambilan Dana BLT :</b>			
<b>Pilihan Jawaban</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Percent of Responses</b>	<b>Percent of Cases</b>
Ojek	167	42,4 %	48,1 %
Angkutan Umum	136	34,5 %	39,2 %
Jalan Kaki	54	13,7 %	15,6 %
Kendaraan Pribadi	37	9,4 %	10,7 %
<b>Jumlah</b>	<b>394</b>	<b>100 %</b>	<b>113,5 %</b>
<b>Keluhan Terhadap Program BLT :</b>			
<b>Pilihan Jawaban</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Percent of Responses</b>	<b>Percent of Cases</b>
Sosialisasi	135	30,8 %	38,9 %
Pendataan	128	29,2 %	36,9 %
Penanganan Masalah	72	16,4 %	20,7 %
Jumlah Dana	62	14,2 %	17,9 %
Pencairan Dana	41	9,4 %	11,8 %
<b>Jumlah</b>	<b>438</b>	<b>100 %</b>	<b>126,2 %</b>

Tabel 5.6 (sambungan)

<b>Sumber informasi pertama tentang BLT :</b>			
<b>Pilihan Jawaban</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Percent of Responses</b>	<b>Percent of Cases</b>
Media Elektronik	146	42,1 %	42,1 %
Pertemuan Warga	109	31,4 %	31,4 %
Aparat	73	21 %	21 %
Koran	19	5,5 %	5,5 %
<b>Jumlah</b>	<b>347</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
<b>Pemanfaatan Dana BLT :</b>			
<b>Pilihan Jawaban</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Percent of Responses</b>	<b>Percent of Cases</b>
Konsumsi	302	47,5 %	87 %
Pembayaran Hutang	106	16,7 %	30,5 %
Kesehatan	87	13,7 %	25,1 %
Pendidikan	61	9,6 %	17,6 %
Sewa Rumah	46	7,2 %	13,3 %
Modal Usaha	23	3,6 %	6,6 %
Ditabung	11	1,7 %	3,2 %
<b>Jumlah</b>	<b>636</b>	<b>100 %</b>	<b>183,3 %</b>

Sumber : Hasil Penelitian Penulis

## 5.2 Pembahasan

Berdasarkan tabel diatas, untuk variabel efektifitas, pada indikator pertama yaitu penerima dana BLT dapat memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga dengan adanya program tersebut, sebanyak 217 responden (62,5%) responden menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan nilai rata-rata (mean) jawaban responden untuk indikator ini sebesar 3,11, serta modus yaitu 3 (setuju). Hal ini dapat dipahami karena responden selaku rumah tangga saaran rata-rata menggunakan uang bantuan langsung tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar, hak ini dilihat kembali dari

hasil perhitungan *multiple response* dimana sebanyak 302 responden memanfaatkan untuk konsumsi, karena sifat uang yang *unconditional* sehingga penerima dapat dengan bebas melakukan peruntukkan akan dana tersebut. Namun dari hasil *multiple response* ditemukan bahwa sangat sedikit yang menggunakan uang sebagai modal usaha, jumlah masyarakat yang menggunakannya untuk pembayaran hutang jauh lebih besar, selanjutnya berdasarkan wawancara dengan ketua RW 02 Kelurahan Tanjung Enim, diketahui bahwasannya terdapat banyak penduduk miskin yang terjatuh hutang dengan rentenir, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran akibat bunga yang tinggi yang ditetapkan oleh rentenir. Saat uang didapatkan, beberapa penduduk menggunakannya untuk membayar hutang, sehingga uang tersebut habis dalam waktu singkat dan sangat kecil kemungkinan untuk dapat disisakan dan dimanfaatkan untuk hal lain.

Pada indikator kedua untuk variabel efektifitas yakni pernyataan kesejahteraan penerima BLT tidak menurun dengan adanya program BLT walaupun terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok, sebanyak 186 orang (53,6%) menyatakan setuju, namun yang menyatakan tidak setuju juga cukup tinggi yaitu sebanyak 110 orang (31,7%), berdasarkan wawancara dengan salah satu sampel yang menyatakan tidak setuju, Bapak Jumari di Desa Tegal Rejo, bahwa mereka tidak merasakan manfaat jangka panjang serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan. Manfaat yang dirasakan hanya dalam jangka pendek, sehingga mereka tetap berada pada kondisi miskin, karena uang hanya berguna dalam waktu singkat untuk membeli kebutuhan pokok, sehingga saat uang tersebut sudah dibelanjakan maka mereka tidak memiliki sumber penghasilan terutama dialami oleh mereka yang memang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan.

Indikator ketiga yaitu pernyataan bahwa program BLT merupakan bentuk tanggung jawab sosial pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga BBM, sebanyak 67,1% (233 orang) setuju dengan pernyataan tersebut, dengan nilai mean 3,08 yang menunjukkan bahwa responden rata-rata setuju bahwa program bantuan langsung tunai merupakan bentuk tanggung jawab sosial pemerintah serta merupakan bentuk untuk meningkatkan tanggung jawab

sosial bersama, meskipun beberapa responden menyatakan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan hal tersebut.

Variabel Perataan, terdiri atas 6 indikator. Indikator pertama yaitu identitas yang tertera di kartu kompensasi BBM sudah sesuai dengan identitas dari penerima bantuan, sebanyak 198 orang (57,1%) menyatakan setuju, dan 64 orang (18,4%) menyatakan sangat setuju, tidak jauh berbeda dengan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 62 orang (17,9%), dan terdapat kelompok yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 23 orang (6,6%), berdasarkan wawancara dengan responden yang menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut, Siti Aisyah di Kelurahan Tanjung Enim, dikarenakan identitas yang tertera di KKB miliknya tidak cocok dengan identitas yang sebenarnya di kartu identitasnya (KTP), hal ini terkait dengan pendataan yang kurang akurat sehingga tidak terjadi kecocokan data antara identitas penduduk dengan kartu kompensasi yang dibagikan, hal ini terkadang mempersulit saat akan melakukan pencairan dana karena petugas seringkali kesulitan untuk memastikan bahwa yang mengambil dana adalah orang yang bersangkutan akibat ketidakcocokan identitas tersebut.

Indikator kedua dari variabel perataan yaitu pernyataan ukuran yang digunakan pemerintah untuk menentukan kriteria penerima dana BLT sudah tepat, sebanyak 224 orang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, namun kemudian ketika hal ini dikonfirmasi dengan pihak yang menyatakan tidak setuju sebanyak 40 orang (11,5%) mereka menyatakan bahwa kriteria yang ada belum memadai dan sepenuhnya tepat dijadikan ukuran, karena terdapat ukuran lain yang seharusnya dimasukkan tetapi belum ada, serta kriteria yang sudah ada kerap kali ambigu untuk dipergunakan, karena kriteria yang digunakan sulit untuk diterapkan secara utuh, karena tidak semua masyarakat memenuhi kriteria tersebut, yang kemudian mengharuskan pihak yang melakukan pendataan menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Pernyataan bahwa penerima BLT yang ada sudah memenuhi kriteria atau memang layak mendapatkan bantuan yang menjadi indikator ketiga, sebanyak 177 orang (51%) menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, namun sampel yang memilih tidak setuju sebanyak 86 orang (24,8%) menempati posisi kedua terbanyak, hal tersebut berkaitan dengan masih ada penerima bantuan yang

seharusnya mendapatkan bantuan namun belum menerima bantuan, sebaliknya ada yang seharusnya tidak berhak menerima namun justru memperoleh dana tersebut, hal inipun masih terkait dengan proses pendataan serta kriteria yang digunakan dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan, walaupun hanya sebagian kecil saja, namun tetap menimbulkan rasa iri dan kecemburuan bagi mereka yang tidak mendapatkan dana.

Indikator yang keempat yaitu dana BLT sudah dibagikan secara merata kepada masyarakat yang memang layak menerima bantuan, sebanyak 225 orang (64,8%) menyatakan setuju dengan pernyataan ini, dana yang diterima memang dibagikan dengan merata sesuai dengan ketentuan jumlah yang seharusnya, namun bagi beberapa masyarakat yang belum terdata sebelumnya, dimasukkan ke dalam daftar penerima susulan, sehingga mereka yang belum terjangkau sebelumnya, bisa mendapatkan dana bantuan tersebut.

Untuk butir indikator kelima yaitu pembagian dana per tiga bulan sudah tepat, sebanyak 148 orang (42,7%) menyatakan tidak setuju, dan sebanyak 124 orang (35,7%) menyatakan setuju. Berdasarkan wawancara kepada sampel yang menyatakan tidak setuju, mereka beranggapan bahwa mereka lebih menginginkan dapat menerima dana sebulan sekali, hal ini dapat dipahami karena terutama dipilih oleh mereka yang tidak memiliki penghasilan. Sementara bagi mereka yang setuju dengan pernyataan tersebut menyatakan bahwa mereka pada prinsipnya menerima semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pihak yang diberi mereka menyetujui kebijakan pembagian per tiga bulan tersebut.

Sementara indikator terakhir untuk variabel perataan yaitu Kartu Kompensasi BBM (KKB) sudah dibagikan tepat waktu dan merata sebanyak 234 (67,4%) orang menyatakan setuju dan sebanyak 92 orang (26,5%) menyatakan sangat setuju, dan hanya sebagian kecil yakni 16 orang (4,6%) dan 5 orang (1,4%), yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju, hal ini menggambarkan bahwa KKB sudah dibagikan dengan baik oleh petugas, sehingga masyarakat tidak mengalami keterlambatan saat dilakukan pembagian dana di kantor pos.

Variabel selanjutnya adalah variabel responsivitas, dengan indikator pertama yaitu pelaksanaan sosialisasi program sudah dilaksanakan dengan baik,

sebanyak 142 orang (40,9%) menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut, dengan nilai simpangan sebesar 0,80, berdasarkan wawancara dengan masyarakat yang tidak mendukung pernyataan tersebut diakui bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh petugas belum maksimal, sehingga masyarakat kerap kali kebingungan dengan prosedur tentang pengambilan dana BLT, baik itu teknis pengambilan, jadwal pengambilan ataupun juga besaran dana yang akan diterima, informasi lebih banyak menyebar antar komunikasi sesama warga, sehingga informasi yang didapat tidak akurat, hal ini juga ditunjukkan dari hasil *multiple response* terlihat bahwa sebanyak 146 responden (42,1%) memperoleh informasi dari media elektronik, dan sebanyak 109 responden (31,4%) memperoleh informasi dari pertemuan antar warga. Lemahnya sosialisasi ini berdampak pada kebingungan dari para penerima bantuan terhadap mekanisme pelaksanaan kebijakan Hal ini juga diperkuat dari hasil *multiple response* terhadap keluhan masyarakat terhadap program bantuan langsung tunai keluhan tertinggi masyarakat sebanyak 135 orang (30,8%) adalah dalam hal sosialisasi.

Jawaban bagi indikator kedua yaitu pernyataan bahwa pelaporan terhadap keluhan sudah berjalan dan diterima dengan baik sebanyak 176 responden (50,7%) setuju pernyataan tersebut, sedangkan 128 responden (36,9%) responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Menurut responden yang menyatakan tidak setuju, Bapak Adenan dari Desa Keban Agung, petugas ataupun aparat seringkali lambat dalam merespon keluhan dari masyarakat, namun hal ini juga dimungkinkan karena banyaknya jumlah penerima bantuan dengan beragam keluhan sementara waktu untuk mengantisipasi keluhan tersebut sangat terbatas, serta harus melalui proses yang cukup panjang, misalnya data untuk penerima susulan ataupun perubahan identitas serta alamat dari penerima bantuan, kesalahan nama ataupun alamat penduduk yang bersangkutan yang terkadang tidak secara proaktif dilaporkan penerima bantuan kepada petugas juga mengakibatkan ada beberapa penerima bantuan yang tidak dapat melakukan pengambilan karena kesalahan nama ataupun yang bersangkutan tidak berada di tempat atau di alamat yang tertera. Hal ini menyulitkan aparat untuk secara cepat menangani keluhan yang dialami oleh para penerima bantuan. Dari hasil *multiple response* diketahui bahwasannya keluhan yang dialami oleh masyarakat terhadap

program bantuan langsung tunai antara lain Sosialisasi sebanyak 135 responden (30,8%), lalu diikuti Pendataan sebanyak 128 responden (29,2%), sebanyak 72 orang (16,4%) memiliki keluhan akan penanganan masalah, kemudian disusul jumlah dana sebanyak 62 orang (14,2%), dan terakhir keluhan akan pencairan dana sebanyak 41 orang (9,4%).

Untuk indikator ketiga sebanyak 152 responden (43,8%) setuju dengan pernyataan bahwa keluhan yang disampaikan sudah ditanggapi dan ditinidaklanjuti dengan cepat dan tepat namun tidak jauh berbeda dengan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 140 orang (40,3%). Hal ini ternyata bergantung pada lokasi desa atau kelurahan responden yang bersangkutan, terdapat desa/kelurahan yang memang sudah menanggapi keluhan masyarakat dengan baik namun juga terdapat desa/kelurahan yang belum memberikan tanggapan keluhan dengan baik sehingga menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat. Sama halnya dengan indikator sebelumnya, selain dipengaruhi oleh kinerja aparat per kelurahan/desa, juga dipengaruhi oleh aktif atau tidaknya masyarakat dalam mentyampaikan keluhan yang dialami.

Sementara jawaban bagi indikator keempat yaitu ketergantungan terhadap dana BLT, sebanyak 218 reponden (62,8%) menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, dan 95 orang (27,4%) menyatakan sangat setuju, jumlah jawaban yang cukup signifikan untuk mendukung pernyataan. Masyarakat secara tidak langsung mengalami ketergantungan terhadap dana BLT tersebut. Hal ini diperkuat dengan wawancara dengan Kades Tegal Rejo, beliau menyatakan bahwa program pemberian bantuan ini secara tidak langsung telah menimbulkan semacam ketergantungan dari masyarakat, sehingga mereka menjadi malas untuk berusaha mendapatkan penghasilan, karena mereka memiliki anggapan dengan tidak bekerja pun mereka akan mendapatkan uang, yang kemudian berdampak kepada jumlah angka kemiskinan menjadi sulit untuk ditekan, dan juga salah satu responden yang mendukung pernyataan tersebut berpendapat bahwa dia mengalami kesulitan tatkala program bantuan langsung tunai tersebut dihentikan, karena tidak memiliki sumber penghasilan, sehingga dia semakin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan dia berharap program tersebut dapat dilanjutkan di tahun-tahun mendatang.

Untuk indikator kelima dari variabel responsivitas, yakni pernyataan bahwa program BLT tersebut menimbulkan kerawanan dan kecemburuan sosial di masyarakat, 198 responden (57,1%) menyatakan tidak setuju, salah satu responden menyatakan bahwa, tidak ada kecemburuan serta gejala kerawanan sosial yang begitu berarti di dalam lingkungan masyarakat, namun pendapat berbeda juga diungkapkan responden yang setuju dengan pernyataan tersebut, karena masyarakat yang berhak menerima bantuan tetapi tidak mendapatkan bantuan merasa cemburu dengan mereka yang mendapatkan bantuan, sehingga kerap kali menimbulkan rasa apatis dari masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan jika ada program dari pemerintah yang akan dilaksanakan yang membutuhkan bantuan serta kerjasama masyarakat. Hal ini diperjelas dengan wawancara dengan ketua RW 5 Kelurahan Pasar Tanjung Enim, masyarakat yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan ataupun terlambat mendapatkan kartu kompensasi, kerap kali mendatangi rumah ketua RW dengan beragam tuntutan walaupun tidak sampai menimbulkan tindakan anarkis tetapi tetap menimbulkan ketidaknyamanan akan keharmonisan dalam hubungan bermasyarakat.

Indikator keenam yaitu pernyataan mengenai jarak menuju kantor Pos tidak jauh, sebanyak 159 orang (45,8%) menyatakan setuju, 108 orang (31,1%) menyatakan tidak setuju, 45 orang (13%) menyatakan sangat setuju dan 35 orang (10,1%) menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini juga dipengaruhi oleh lokasi desa/kelurahan responden. Pengambilan dan dilaksanakan di Kantor Pos Tanjung Enim yang berada di wilayah Desa Lingga, bagi masyarakat yang tinggal di Desa Darmo, Desa Keban Agung, Kelurahan Tanjung Enim, lokasi kantor pos cukup jauh untuk dijangkau karena jarak antara desa atau kelurahan mereka yang memang berada cukup jauh dari kantor pos. Begitu pun bagi masyarakat penerima bantuan yang berada di desa atau kelurahan lain, bagi mereka yang tempat tinggalnya berdekatan dengan kantor pos tentu tidak terlalu menjadi kendala, namun bagi mereka yang tinggal jauh dari kantor pos, harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi menuju kantor pos. Hasil *multiple response* terhadap moda transportasi yang digunakan responden untuk melakukan pengambilan bantuan menunjukkan sebagian besar responden sebanyak 167 orang (42,4%)

menggunakan ojek sebagai sarana transportasi, kemudian angkutan umum sebanyak 136 orang (34,5%), kemudian diikuti dengan berjalan kaki sebanyak 54 orang (12,7%), serta terakhir dengan menggunakan kendaraan pribadi sebanyak 37 orang (9,4%). Jarak mempengaruhi penggunaan moda transportasi yang digunakan masyarakat, jika jarak yang ditempuh cukup jauh terdapat responden yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi.

Terakhir indikator untuk variabel responsivitas yaitu pernyataan mengenai waktu untuk mengantri pada saat pengambilan dana tidak lama atau kurang dari satu jam, sebanyak 147 (47,4%) orang menyatakan tidak setuju, dan yang menyatakan setuju sebanyak 138 orang (39,8%). Hal tersebut dipicu karena tidak adanya penjadwalan yang dilakukan untuk melakukan pengambilan, sehingga masyarakat cenderung datang pada hari pertama, bagi masyarakat yang datang pada hari pertama tentu akan mengalami antrian yang cukup panjang, sementara bagi mereka yang datang pada hari selanjutnya cenderung tidak terlalu lama melakukan antrian. Selain karena penjadwalan hal ini juga dipengaruhi oleh sosialisasi yang diberikan oleh petugas belum komprehensif dalam memberikan informasi tentang prosedur tata cara pengambilan dana, dan juga dipicu oleh kesulitan dari petugas untuk memastikan bahwa yang melakukan pengambilan adalah benar-benar orang yang bersangkutan karena kerap kali penerima tidak membawa identitas, ataupun data identitas yang ada tidak cocok dengan yang tertera di kartu KKB.

Selanjutnya variabel ketepatan dengan indikator pertama yaitu dana BLT dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sebanyak 217 orang (62,5%) mendukung pernyataan tersebut, juga sebanyak 118 orang (34%) menyatakan sangat setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menggunakan dana BLT untuk memenuhi kebutuhan pokok, hal ini juga diperkuat dengan hasil perhitungan *multiple responses* yang merinci sebanyak 302 responden (47,5%) masyarakat menggunakan untuk konsumsi, kemudian sebanyak 106 responden (16,7%) menggunakan untuk pembayaran hutang, untuk biaya kesehatan sebanyak 87 orang (13,7%), kemudian diikuti penggunaan uang untuk biaya pendidikan sebanyak 61 orang (9,6%), perbaikan/sewa rumah sebanyak 46 orang (7,2%), sementara yang menggunakan dana tersebut untuk

modal usaha hanya 23 responden (3,6%), dan jumlah yang paling sedikit memanfaatkan dana untuk ditabung hanya 11 responden (1,7%). Terlihat bahwa selain untuk konsumsi, hampir sebagian responden menggunakannya untuk pembayaran hutang, dan sangat sedikit yang menggunkannya sebagai modal usaha. Demikian halnya penggunaan dana untuk pendidikan, digunakan oleh mereka yang masih memiliki tanggungan keluarga yang masih bersekolah untuk membeli berbagai perlengkapan sekolah, dan mereka sangat terbantu terutama saat pembagian yang bertepatan dengan tahun ajaran baru. Sangat sedikit yang mampu menyetor dana tersebut untuk ditabung, biasanya mereka yang sudah tidak memiliki tanggungan yang masih mampu menyetor sebagian uang tersebut, dengan peruntukkan sebagai dana cadangan jika sewaktu waktu terdapat kebutuhan mendesak.

Sementara untuk indikator kedua dari variabel ketepatan yaitu, dana BLT mampu meningkatkan produktifitas usaha dalam mendapatkan penghasilan, sebanyak 173 orang (49,9%) menyatakan tidak setuju, 94 orang (27,1%) menyatakan sangat tidak setuju. Sebagian besar responden tidak mendukung pernyataan tersebut. Hal ini disebabkan karena manfaat dana BLT hanya bersifat jangka pendek, tidak memiliki manfaat jangka panjang terutama bagi peningkatan produktifitas masyarakat penerima bantuan dalam mendapatkan penghasilan, berdasarkan hasil perhitungan *multiple reponses* menunjukkan bahwa hanya sebanyak 23 orang (3,6%) dari 347 responden yang memanfaatkan dana sebagai modal usaha. Yang menggunakan sebagai modal usaha rata rata adalah mereka yang sudah memiliki usaha sebelumnya misalnya berdagang, tapi tidak ada yang menggunakan untuk membuat usaha baru. Dampaknya kemudian angka kemiskinan sulit untuk dikurangi, masyarakat hanya merasakan manfaat hanya dalam waktu singkat, sementara untuk jangka panjang mereka tetap tidak mampu meningkatkan produktifitas untuk mendapatkan penghasilan.

Indikator ketiga yaitu pernyataan program dialihkan ke program padat karya yang memberdayakan masyarakat, 174 orang (50,1%) menyatakan tidak setuju, 90 orang (25,9%) menyatakan sangat tidak setuju. Dengan alasan bahwa tidak semua masyarakat miskin akan mampu ikut jika dialihkan ke dalam bentuk program padat karya, terutama bagi mereka yang memiliki usia lanjut. Namun

terdapat 56 orang (16,1%) yang menyatakan setuju dan 27 orang (7,8%) yang sangat setuju, dengan anggapan bahwa mereka akan lebih memiliki modal serta keterampilan dalam berusaha, sehingga akan memiliki manfaat jangka panjang dalam meningkatkan produktifitas untuk mendapatkan penghasilan.

### **5.3 The Analytical Hierarchy Process**

#### **5.3.1 Pembuatan Struktur Hierarki Keputusan**

Struktur hierarki keputusan dibuat dengan berdasarkan hasil kuesioner pertama yang dibagikan kepada sampel ekspert, yang kemudian hasilnya akan menjadi struktur hierarki dan kemudian dinilai tingkat konsistensinya untuk mengetahui strategi atau alternatif yang akan menjadi prioritas yang akan ditentukan dari hasil perhitungan kuesioner kedua. Kriteria dan sub kriteria yang digunakan dalam hierarki diperoleh melalui tahapan studi literatur, sementara alternatif strategi ditentukan berdasarkan wawancara awal dengan responden sebagai ekspert, kemudian kriteria, sub kriteria dan alternatif kebijakn tersebut disusun agar lebih sistematis ke dalam hierarki. Indikator atau faktor faktor yang digunakan dalam proses analisis hierarki terbagi menjadi 3 level, dari level yang paling rendah (level 3) hingga ke level tertinggi (level 0). Kriteria dan sub kriteria yang dipakai sama dengan indikator yang digunakan pada kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat karena memiliki tujuan (*goal*) yang sama yaitu untuk mengevaluasi kinerja kebijakan bantuan langsung tunai, dengan tujuan untuk membandingkan antara persepsi masyarakat dengan penentuan priotitas kepentingan dari aparat sebagai ekspert. Akan tetapi pada analisis AHP juga ditentukan strategi alternatif kebijakan, alternatif strategi ditentukan berdasarkan hasil wawancara awal dengan para responden AHP. Berikut rincian kriteria dan sub kriteria serta alternatif strategi kebijakan yang digunakan dalam analisis hirarki :

#### **I. Alternatif Strategi (Level 3)**

Alternatif strategi kebijakan yang digunakan dalam analisis ini terdiri atas :

- a. Keberlanjutan Kebijakan.
- b. Kebijakan dialihkan dalam bentuk lain.
- c. Kebijakan dihapuskan

## II. Kriteria (Level 1) dan Sub Kriteria (Level 2)

### 1. Kriteria Efektifitas

Yaitu pencapaian hasil yang diinginkan dari suatu kebijakan, terdiri atas sub kriteria :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga sasaran.
- b. Tingkat kesejahteraan rumah tangga sasaran tidak menurun.
- c. Adanya peningkatan tanggung jawab sosial bersama.

### 2. Kriteria Perataan

Yaitu biaya dan manfaat suatu kebijakan didistribusikan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Kriteria ini terdiri atas sub kriteria :

- a. Ketepatan target atau sasaran.
- b. Kecocokan identitas penerima BLT.
- c. Ketepatan distribusi Kartu Kompensasi BBM.
- d. Jangkauan atau cakupan sasaran program,

### 3. Kriteria Responsivitas

Yaitu hasil kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Kriteria ini meliputi beberapa sub kriteria yaitu :

- a. Sosialisasi Program
- b. Pelaporan dan penanganan keluhan.
- c. Ketergantungan terhadap program.
- d. Potensi konflik dan kecemburuan sosial
- e. Proses pengambilan dana

### 4. Ketepatan

Yaitu hasil atau tujuan yang diinginkan dari suatu kebijakan benar-benar berguna atau bernilai. Kriteria ini terdiri atas sub kriteria :

- a. Pemanfaatan atau penggunaan dana oleh penerima bantuan.
- b. Peningkatan produktifitas rumah tangga sasaran
- c. Adanya pemberdayaan masyarakat

### III. Tujuan / Goal (Level 0)

Sebagai tujuan penelitian dengan analisis ini adalah untuk mengevaluasi kinerja kebijakan bantuan langsung tunai di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim yang ditempatkan pada tingkatan hierarki paling atas (level 0).

Berikut ditampilkan tabel 5.7 yang merupakan hasil kuesioner pertama yang akan menjadi kriteria dan sub kriteria dalam struktur hierarki.

**Tabel 5.7 Kriteria dan Sub Kriteria Evaluasi Kinerja Kebijakan Bantuan Langsung Tunai**

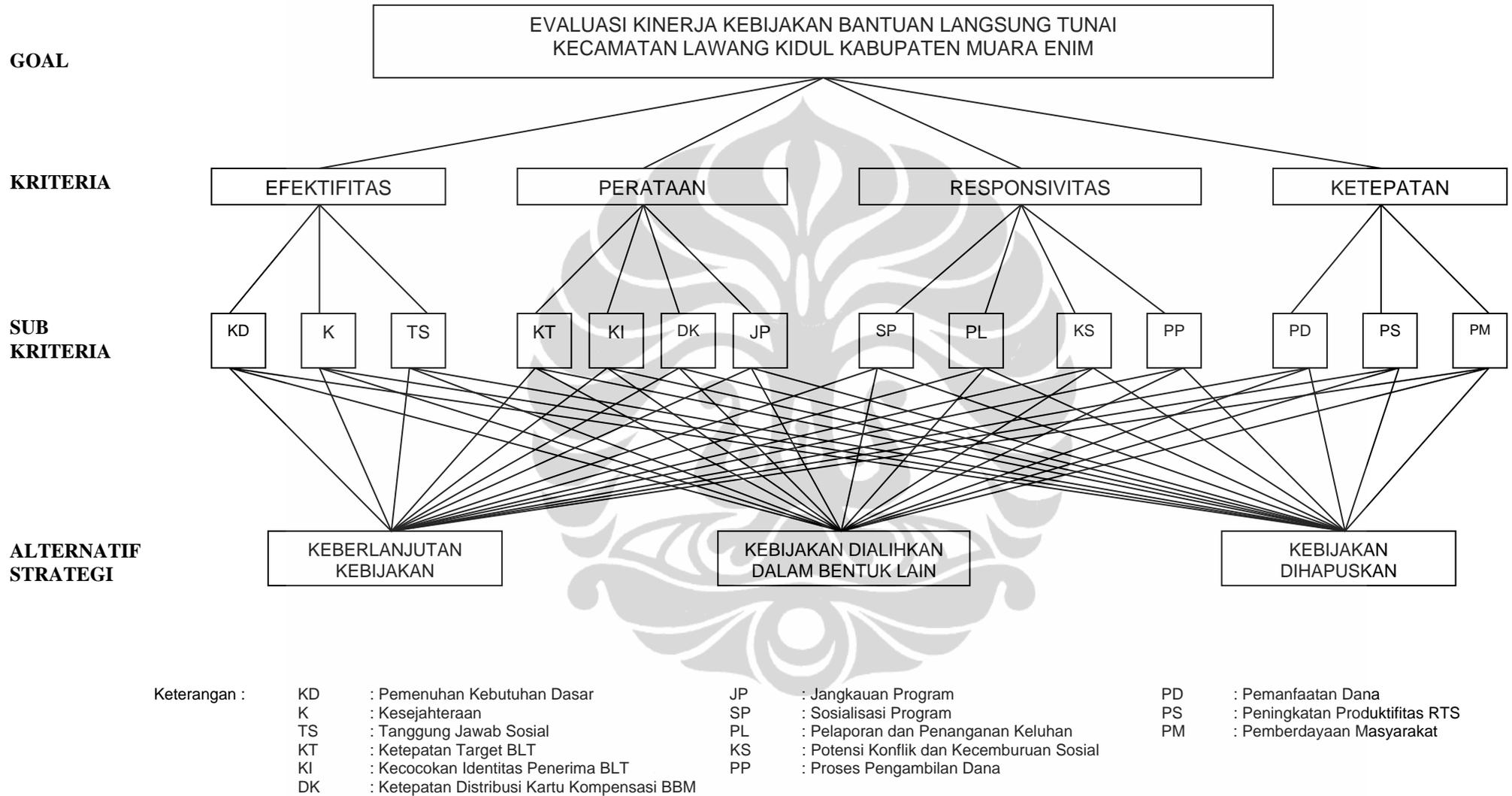
No	Kriteria dan Sub Kriteria	Penilaian Responden					Mean
		1	2	3	4	5	
I	<b>Kriteria : Efektifitas</b>	5	4	5	5	5	4,8
	<b>Sub Kriteria :</b>						
	1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Rumah Tangga Sasaran.	4	5	4	4	3	4
	2. Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran tidak menurun.	5	5	5	4	5	4,8
	3. Adanya tanggung jawab sosial bersama.	5	4	4	5	5	4,6
II	<b>Kriteria : Perataan</b>	4	4	5	3	5	4,2
	<b>Sub Kriteria :</b>						
	1. Ketepatan target atau sasaran.	5	5	5	5	5	5
	2. Kecocokan identitas penerima BLT.	4	5	5	4	5	4,6
	3. Ketepatan distribusi Kartu Kompensasi BBM.	4	4	5	5	4	4,2
4. Jangkauan atau cakupan sasaran program.	5	4	4	5	5	4,6	
III	<b>Kriteria : Responsivitas</b>	5	5	4	4	4	4,4
	<b>Sub Kriteria :</b>						
	1. Sosialisasi Program.	4	5	5	4	5	4,6
	2. Pelaporan dan Penanganan Keluhan.	4	5	5	3	5	4,4
	3. Ketergantungan Terhadap Program	3	4	2	3	5	3,4
	4. Potensi Konflik dan Kecemburuan Sosial.	5	5	3	5	5	4,6
5. Proses Pengambilan dana	5	4	4	5	4	4,4	

Tabel 5.7 (sambungan)

No	Kriteria dan Sub Kriteria	Penilaian Responden					
		1	2	3	4	5	Mean
IV	Kriteria : Ketepatan	5	4	4	5	5	4,6
	<b>Sub Kriteria :</b>						
	1. Pemanfaatan atau Penggunaan dana oleh penerima bantuan	4	5	5	4	5	4,6
	2. Peningkatan Produktifitas Rumah Tangga Sasaran.	5	4	4	5	4	4,4
	3. Adanya Pemberdayaan Masyarakat.	5	5	5	5	5	5

Sumber : Hasil Penelitian Penulis

Berdasarkan hasil analisis Kuesioner 1 tersebut diatas, skala penilaian yang dianggap logis pada skala 4, sehingga kriteria utama dan sub kriteria yang memiliki nilai rata-rata sama dengan atau lebih dari 4 yang akan disusun sebagai hierarki dan akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja kebijakan, untuk sub kriteria ketergantungan terhadap program tidak dimasukkan hierarki karena nilai rata rata yang didapat kurang dari 4. Struktur hierarki dibuat untuk memudahkan pengambil keputusan dalam melihat permasalahan dengan lebih terstruktur sehingga dapat diambil alternatif strategi kebijakan sehingga tujuan yang ingin diinginkan dapat tercapai. Berikut dibawah ini struktur hierarki pada gambar 5.1 :



Gambar 3.1 Model Analisis Penyusunan Hirarki

Sumber : Hasil Penelitian Penulis

### 5.3.2 Uji Konsistensi dan Pembobotan

Uji konsistensi dan pembobotan faktor-faktor adalah proses mengukur tingkat kepentingan relatif antar kriteria, sub kriteria, dan alternatif strategi kebijakan dengan melakukan penilaian perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) antar faktor-faktor dalam setiap kelompok faktor yang terletak dalam hirarki yang sama. Penilaian dilakukan oleh para ekspert yang memiliki pengalaman, pengetahuan, serta kompetensi dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai, jumlah sekspert yang dijadikan responden sebanyak 5 orang. Penggabungan pendapat responden ahli dilakukan dengan menggunakan rata-rata geometrik, dengan rumus sebagai berikut<sup>74</sup>:

$$\text{Rata-rata geometrik} = \sqrt[n]{\prod a_{ij}} \quad (5.1)$$

Dimana : n = Jumlah *Expert*

$a_{ij}$  = penilaian responden ke-i

#### 5.3.2.1 Uji Konsistensi dan Pembobotan Kriteria Utama

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner tahap kedua yang diisi oleh kelima responden yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Kecamatan Lawang Kidul. Hasil kuesioner kemudian tersebut dianalisis untuk menguji tingkat konsistensi serta bobot kepentingannya, yang hasilnya dapat dilihat pada lampiran.

Menurut tingkat kepentingannya, kriteria efektifitas memiliki bobot yang paling tinggi yakni sebesar 0.618, selanjutnya disusul oleh kriteria ketepatan 0,239, kemudian diikuti perataan sebesar 0.094 dan terakhir diisi oleh kriteria responsivitas sebesar 0.049. Hal ini dinilai oleh para responden dengan anggapan bahwa, efektifitas serta sub kriteria yang ada di dalamnya memiliki tujuan yang luas dan mendasar, serta dipandang lebih strategis dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin walalupun kemudian masih tergantung kepada bentuk program atau kebijakan yang akan dikeluarkan. Kemudian diikuti dengan ketepatan dengan anggapan para responden bahwa ketetapan sasaran dari suatu kebijakan akan lebih mampu mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dari sebuah kebijakan. Konsistensi rasio dari

<sup>74</sup> Marimin, *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*, Cetakan kedua, (Jakarta, PT. Gramedia, 2005), 89

pembobotan kriteria utama sebesar 0.06 yang berarti secara umum jawaban responden konsisten dalam menentukan bobot kriteria utama dalam menentukan prioritas alternatif strategi kebijakan untuk mengevaluasi kinerja suatu kebijakan. Hasil perhitungan untuk menentukan bobot kriteria utama ditampilkan melalui Tabel 5.8 berikut :

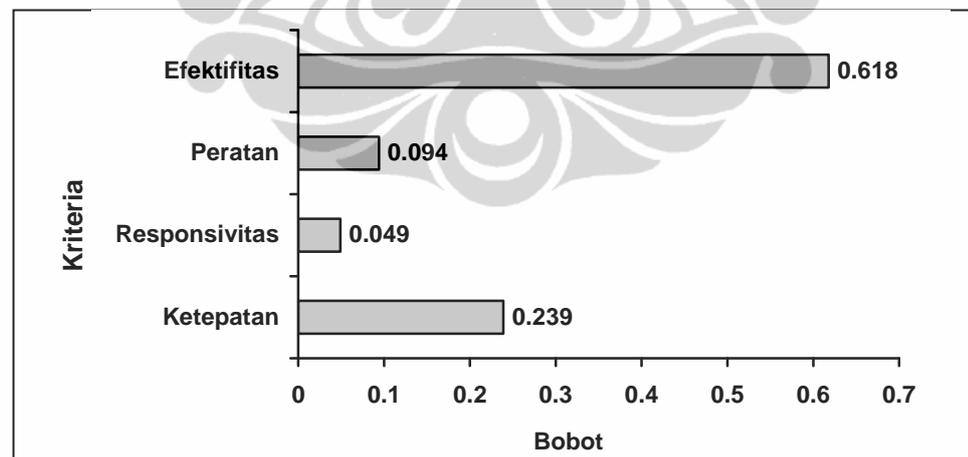
**Tabel 5.8 Bobot Prioritas Kriteria Utama**

No	Kriteria	Bobot	
		Lokal	Global
1	Efektifitas	0,618	0,618
2	Perataan	0,094	0,094
3	Responsivitas	0,049	0,049
4	Ketepatan	0,239	0,239
<b>Total</b>			1

Consistency Ratio (CR) = 0,06

Sumber : Hasil Penelitian Penulis

Hasil perhitungan bobot kriteria utama diatas digambarkan melalui gambar 5.2 berikut :



**Gambar 5.2 Bobot Prioritas Kriteria Utama**

Sumber : Hasil Penelitian Penulis

### 5.3.2.2 Uji Konsistensi dan Pembobotan Sub Kriteria

Berdasarkan perhitungan bobot untuk menentukan skala prioritas pada sub kriteria yang berada pada level 2. Menurut tingkat kepentingannya

perhitungan bobot pada sub kriteria dari efektifitas, tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin menempati prioritas tertinggi dengan bobot 0.658, yang kemudian diikuti oleh sub kriteria adanya tanggung jawab sosial bersama dengan jumlah bobot sebesar 0.218, dan kemudian disusul oleh sub kriteria pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga sasaran sebesar 0.124. Bobot prioritas sub kriteria pada kriteria efektifitas menunjukkan sub kriteria tingkat kesejahteraan rumah tangga sasaran tidak menurun memiliki bobot tertinggi, salah satu ekspert menyatakan bahwa kedua sub kriteria lain yaitu adanya tanggung jawab sosial bersama dan pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga sasaran akan dapat terwujud jika kesejahteraan masyarakat miskin meningkat. Pemenuhan kebutuhan dasar saja tidak menjamin bahwa masyarakat miskin lebih sejahtera, demikian pula jika pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan jangka panjang melalui sebuah kebijakan, dengan sendirinya hal tersebut adalah merupakan bentuk tanggung jawab sosial pemerintah terhadap masyarakat ekonomi lemah.

Berdasarkan pada bobot prioritas pada kriteria pemerataan, ketepatan target atau sasaran mendapatkan prioritas tertinggi dengan nilai 0,580, kemudian diikuti oleh jangkauan atau cakupan sasaran program sebesar 0,267, lalu disusul oleh kecocokan identitas penerima BLT dengan bobot nilai 0,102, terakhir ialah sub kriteria ketepatan distribusi kartu kompensasi BBM dengan nilai 0,051. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa ketepatan sasaran menjadi prioritas utama yang dipilih oleh para responden dengan nilai 0,580 menunjukkan bahwa faktor ketepatan sasaran menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan program bantuan langsung tunai yang masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya karena masih terdapat kekeliruan dalam pendataan sehingga terjadi *missing* dalam penargetan rumah tangga sasaran, kemudian jangkauan atau cakupan sasaran program memiliki bobot 0,267, hal ini dikarenakan jangkauan program masih belum mencakup keseluruhan jumlah masyarakat miskin oleh karena itu memerlukan strategi baru dalam pembuatan kebijakan, kecocokan identitas penerima BLT dan ketepatan distribusi BBM mendapat bobot nilai 0,102 dan 0,051, karena menurut responden pelaksanaannya sudah cukup baik dan hanya bersifat hal teknis saja.

Sementara untuk perhitungan bobot untuk sub kriteria pada kriteria responsivitas, bobot prioritas yang tertinggi pada sub kriteria sosialisasi program dengan nilai 0,538, kemudian diikuti sub kriteria pelaporan dan penanganan keluhan sebesar 0,316, lalu disusul oleh sub kriteria proses pengambilan dana, dan sub kriteria potensi konflik dan kecemburuan sosial yang memiliki bobot paling rendah yaitu senilai 0,097. Sosialisasi program mendapat bobot paling tinggi, hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi masih menjadi prioritas untuk ditingkatkan, karena sejalan dengan hasil survey ke masyarakat aspek sosialisasi masih belum berjalan dengan baik, sehingga aspek sosialisasi menjadi hal yang harus diprioritaskan terhadap menentukan strategi kebijakan yang akan ditentukan selanjutnya. Selain itu aspek sosialisasi juga menjadi faktor yang menentukan dalam keberhasilan kebijakan karena terkait erat dengan aspek responsivitas dari masyarakat sebagai pihak yang menerima kebijakan.

Untuk perhitungan bobot prioritas pada sub kriteria dari ketepatan, sub kriteria adanya pemberdayaan masyarakat mendapatkan bobot tertinggi dengan nilai 0,617, kemudian diikuti oleh peningkatan produktifitas rumah tangga sasaran dengan bobot 0,282, dan sub kriteria pemanfaatan atau penggunaan dana oleh penerima bantuan sebesar 0,101. Hal ini dikarenakan menurut para responden kebijakan pemberian bantuan langsung tunai belum memberdayakan masyarakat sepenuhnya dan juga faktor ini berpengaruh besar terhadap keberhasilan kinerja kebijakan yang bersifat jangka panjang, sehingga menjadi prioritas yang paling penting dalam rangka mencari strategi kebijakan di masa yang akan datang. Sub kriteria dengan bobot tertinggi kedua pada kriteria ketepatan yaitu peningkatan produktifitas rumah tangga sasaran, hal ini menjadi prioritas karena responden memandang bahwa dengan memberikan bantuan secara tunai tidak menjamin bahwa masyarakat akan produktif dalam mendapatkan penghasilan, melainkan justru menjadikan masyarakat menjadi malas karena hanya mendapatkan uang tanpa kompensasi apapun dalam penggunaannya, terakhir pemanfaatan atau penggunaan dana oleh penerima bantuan dengan bobot nilai paling kecil 0,101.

Secara global, menurut bobot tingkat kepentingan atau prioritas terhadap tujuan (goal) evaluasi kinerja kebijakan bantuan langsung tunai (level 0), sub

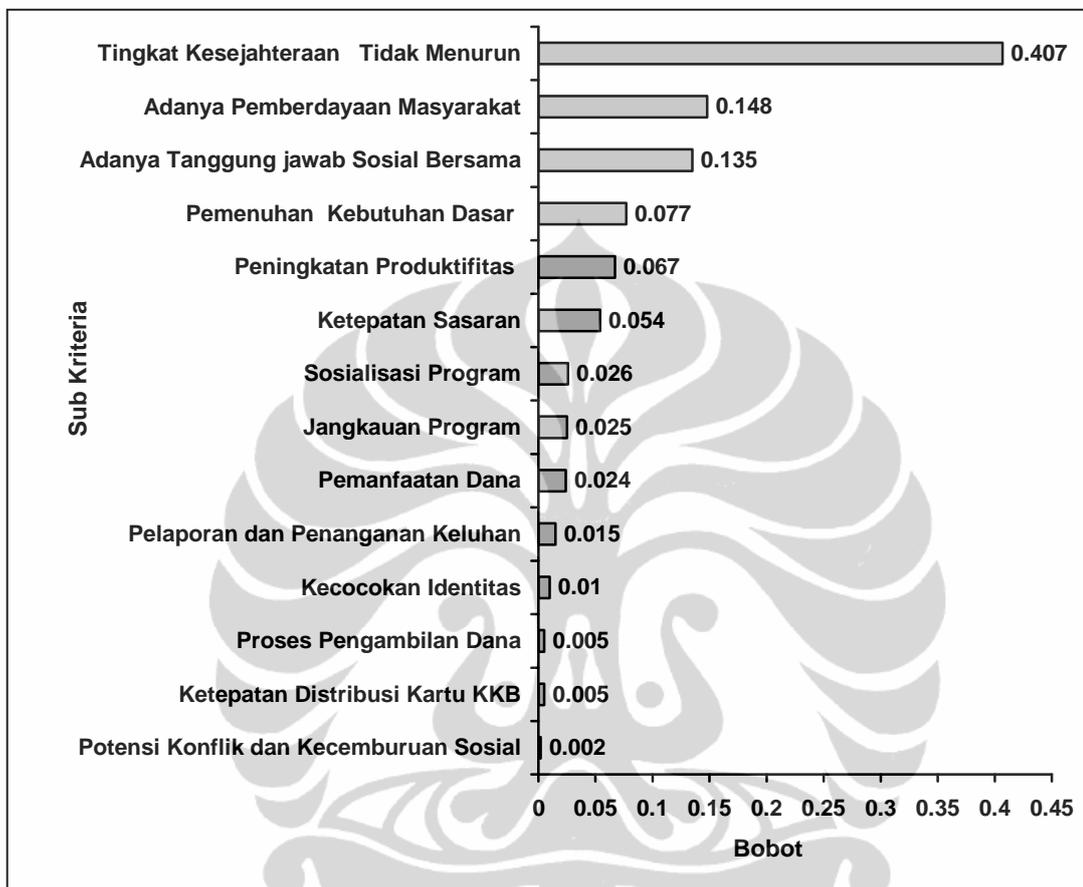
kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat miskin tidak menurun memiliki bobot tertinggidengan nilai 0,407. Kemudian diikuti oleh sub kriteria adanya pemberdayaan masyarakat dengan bobot sebesar 0,148. Sub kriteria lain yang memiliki bobot cukup tinggi dengan nilai diatas 0,1 ialah sub kriteria adanya tanggung jawab sosial bersama dengan nilai bobot sebesar 0,135. Secara lengkap tingkat prioritas secara lokal dan global ditampilkan melalui tabel berikut :

**Tabel 5.9 Bobot Prioritas Sub Kriteria**

No	Kriteria	Sub Kriteria	Consistency Ratio (CR)	Bobot	
				Lokal	Global
I	Efektifitas	1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Rumah Tangga Sasaran.	0,04	0,124	0,077
		2. Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran tidak menurun.		0,658	0,407
		3. Adanya tanggung jawab sosial bersama.		0,218	0,135
II	Perataan	1. Ketepatan target atau sasaran.	0,05	0,580	0,054
		2. Kecocokan identitas penerima BLT.		0,102	0,010
		3. Ketepatan distribusi Kartu Kompensasi BBM.		0,051	0,005
		4. Jangkauan atau cakupan sasaran program.		0,267	0,025
III	Responsivitas	1.Sosialisasi Program.	0,05	0,538	0,026
		2.Pelaporan dan Penanganan Keluhan.		0,316	0,015
		3..Potensi Konflik dan Kecemburuan Sosial		0,049	0,002
		4.Proses Pengambilan dana.		0,097	0,005
IV	Ketepatan	1. Pemanfaatan atau Penggunaan dana oleh penerima bantuan	0,03	0,101	0,024
		2. Peningkatan Produktifitas Rumah Tangga Sasaran.		0,282	0,067
		3. Adanya Pemberdayaan Masyarakat.		0,617	0,148
<b>Total</b>					<b>1</b>

Sumber : Hasil Penelitian Penulis

Berdasarkan tabel bobot prioritas evaluasi kinerja kebijakan bantuan langsung tunai diatas, berikut ditampilkan diagram bobot prioritas secara global melalui gambar 5.3 di bawah ini :



**Gambar 5.3 Bobot Prioritas Global Sub Kriteria**

Sumber : Hasil Penelitian Penulis

### 5.3.2.3 Uji Konsistensi dan Pembobotan Alternatif Strategi Kebijakan

Penganalisisan bobot atau prioritas terhadap alternatif strategi kebijakan dilakukan pada level 2 yaitu pada tingkatan sub kriteria. Pembobotan dilakukan berdasarkan sub kriteria sub kriteria yang sudah ditetapkan berdasarkan kuesioner pertama. Pada kuesioner kedua ditentukan penilaian oleh ekspert terhadap kriteria, sub kriteria serta strategi kebijakan, namun sub kriteria yang menjadi indikator untuk tiap-tiap kriteria belum mencakup sepenuhnya menjelaskan penilaian dari responden yang terpilih, terdapat indikator-indikator lain yang belum atau sulit untuk dideskripsikan dan didefinisikan dengan baik oleh para ekspert berdasarkan pengetahuan, pemikiran, serta pengalamannya.

Penilaian terhadap tingkat kepentingan atau prioritas secara global dari alternatif strategi kebijakan untuk mengevaluasi kinerja kebijakan bantuan langsung tunai di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim antara lain strategi untuk mengalihkan kebijakan dalam bentuk lain mendapatkan prioritas tertinggi dengan bobot 0,748, kemudian diikuti oleh strategi untuk keberlanjutan kebijakan bantuan langsung tunai dengan nilai prioritas 0,164, kemudian strategi kebijakan dihapuskan mendapat bobot paling kecil dengan nilai 0,088.

Strategi untuk mengalihkan kebijakan ke dalam bentuk lain dipilih oleh responden dengan mendapatkan prioritas paling tinggi 0,748, jumlah yang signifikan tinggi dibandingkan dengan kedua strategi lain karena responden beranggapan diperlukan bentuk baru dari kebijakan, agar kekurangan serta kelemahan dari kebijakan bantuan langsung tunai dapat direvisi agar lebih bermanfaat dan bernilai guna bagi masyarakat serta dapat bersifat jangka panjang sehingga tujuan yang ingin dicapai dari dibuatnya sebuah kebijakan bisa tercapai. Strategi kebijakan selanjutnya dengan prioritas kedua tertinggi 0,164 yaitu dengan melanjutkan mekanisme kebijakan bantuan langsung tunai, akan tetapi dengan revisi terhadap berbagai kelemahan, sehingga pelaksanaan di kemudian hari dapat lebih baik, karena terdapat sebagian kecil penduduk yang benar benar membutuhkan dana tersebut walaupun kemudian hanya bersifat jangka pendek, akan tetapi setidaknya mampu mengurangi beban penduduk terhadap kenaikan harga, terdapat perbedaan yang mencolok antara strategi untuk mengalihkan kebijakan dengan melanjutkan kebijakan karena para responden memiliki kecenderungan untuk mencari format baru terhadap kebijakan BLT.

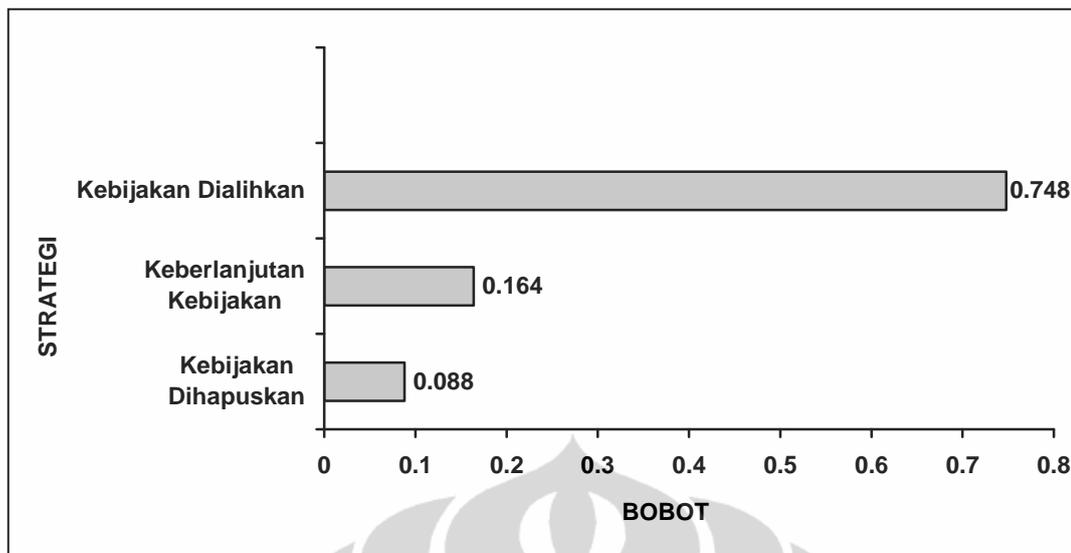
Alternatif strategi kebijakan dengan bobot nilai paling kecil 0,088 adalah strategi untuk menghapuskan kebijakan, hal ini dimungkinkan bahwa responden menilai bahwa mekanisme kebijakan untuk melindungi masyarakat miskin tetap diperlukan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga angka kemiskinan dapat ditekan, hanya saja diperlukan kecermatan dalam merumuskan kebijakan agar kelemahan kebijakan yang sudah dibuat sebelumnya bisa diperbaiki. Berikut secara ringkas pada tabel 5.10 ditampilkan bobot global dari alternatif strategi kebijakan yang dilakukan pada tingkatan sub kriteria.

Tabel 5.10 Bobot Prioritas Alternatif Strategi Kebijakan

No	Sub Kriteria	BOBOT LOKAL & GLOBAL					
		Keberlanjutan Kebijakan		Kebijakan Dialihkan dalam Bentuk Lain		Kebijakan Dihapuskan	
		Lokal	Global	Lokal	Global	Lokal	Global
1	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Rumah Tangga Sasaran.	0,148	0,011	0,774	0,057	0,078	0,006
2	Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran Tidak Menurun.	0,196	0,082	0,730	<b>0,304</b>	0,074	0,031
3	Adanya Tanggung Jawab Sosial Bersama.	0,112	0,015	0,764	<b>0,101</b>	0,124	0,016
4	Ketepatan Target atau Sasaran.	0,146	0,008	0,760	0,041	0,094	0,005
5	Kecocokan Identitas Penerima BLT.	0,153	0,001	0,766	0,007	0,081	0,001
6	Ketepatan Distribusi Kartu Kompensasi BBM.	0,155	0,001	0,747	0,004	0,098	0,0005
7	Jangkauan atau Cakupan Sasaran Program.	0,147	0,004	0,752	0,019	0,101	0,003
8	Sosialisasi Program.	0,255	0,008	0,665	0,020	0,080	0,002
9	Pelaporan dan Penanganan Keluhan.	0,144	0,002	0,753	0,012	0,103	0,002
10	Potensi Konflik dan Kecemburuan Sosial.	0,166	0,0002	0,744	0,002	0,090	0,0004
11	Proses Pengambilan Dana	0,110	0,001	0,764	0,004	0,126	0,0001
12	Pemanfaatan atau Penggunaan Dana oleh Penerima Bantuan	0,129	0,003	0,779	0,018	0,091	0,002
13	Peningkatan Produktifitas Rumah Tangga Sasaran.	0,146	0,009	0,785	0,050	0,069	0,004
14	Adanya Pemberdayaan Masyarakat.	0,136	0,020	0,760	<b>0,110</b>	0,103	0,015
			<b>0,164</b>		<b>0,748</b>		<b>0,088</b>

Sumber : Hasil Penelitian Penulis

Gambar 5.3 berikut menampilkan urutan prioritas secara global alternatif strategi kebijakan terhadap tujuan untuk mengevaluasi kinerja kebijakan bantuan langsung tunai di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, dengan *Overall Consistency Ratio* sebesar 0,05. yang berarti secara global jawaban responden konsisten dalam menentukan alternatif strategi kebijakan yang ada pada struktur hierarki yang sudah disusun sebelumnya.



**Gambar 5.4 Bobot Prioritas Global Alternatif Strategi Kebijakan**

Sumber : Hasil Penelitian Penulis

Strategi untuk mengalihkan kebijakan ke dalam bentuk lain terutama pada prioritas global dari sub kriteria tingkat kesejahteraan tidak menurun, sub kriteria adanya pemberdayaan masyarakat, dan sub kriteria adanya peningkatan tanggung jawab sosial bersama. Ketiga sub kriteria tersebut dipilih oleh responden dikarenakan mereka berpendapat bahwa ketiga sub kriteria tersebut belum terlihat nyata serta dirasakan manfaatnya dalam program bantuan langsung tunai, sehingga diperlukan bentuk kebijakan baru yang mampu mengakomodasi ketiga kategori tersebut agar manfaat yang didapatkan masyarakat benar-benar nyata.

Sub kriteria yang mendapatkan prioritas global paling tinggi untuk strategi mengalihkan kebijakan ke dalam bentuk lain yaitu sub kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat miskin sebagai rumah tangga sasaran tidak menurun karena para responden yang merupakan aparat menginginkan agar angka kemiskinan dapat menurun dan salah satu tolak ukur agar angka kemiskinan tidak meningkat adalah dengan menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat, sub kriteria kedua yang mendapatkan prioritas global cukup tinggi terhadap strategi pengalihan kebijakan yaitu adanya pemberdayaan masyarakat, reponden ahli menginginkan agar sebuah kebijakan dapat bersifat memberdayakan masyarakat sehingga mereka bisa lebih mandiri, tidak senantiasa menunggu bantuan dari pemerintah seperti yang terjadi pada program kebijakan bantuan langsung tunai,

mereka merasa masyarakat justru menjadi malas karena tidak diberdayakan sehingga mereka menjadi pasif untuk mencari penghasilan. Selayaknya masyarakat diberi kail tidak diberi ikan, dengan adanya perubahan bentuk kebijakan diharapkan agar kebijakan atau program yang dibuat selanjutnya dapat memberdayakan masyarakat dengan lebih baik.

